

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian sebelumnya berperan sebagai salah satu rujukan data yang bersifat sekunder. Adapun penelitian terdahulu sebagai sumber data sekunder berguna sebagai pendukung riset yang ingin diselenggarakan. Kajian sebelumnya juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan acuan oleh peneliti dalam mengetahui sudut pandang yang hubungan dengan tema riset yang akan dilakukan

Sebagai contoh data sekunder, kita dapat melihat penelitian sebelumnya. Untuk mendukung riset yang ingin dilaksanakan, data sekunder didapatkan dari penelitian sebelumnya. Untuk lebih memahami berbagai sudut pandang yang terkait dengan topik penelitian, peneliti juga dapat menggunakan penelitian sebelumnya sebagai referensi dan standar.

Penelitian sebelumnya tentang subjek ini dapat ditemukan di (Sirait et al., 2021). Bisnis olahraga secara keseluruhan harus mendukung upaya untuk meningkatkan performa pemain. Alasannya sederhana, seorang atlet tidak dapat tampil sesuai harapan tanpa bantuan tersebut. Kita hanya dapat berharap bahwa performa atlet akan meningkat ketika semua pihak yang terlibat bekerja sama secara harmonis. Pemerintah dan pemangku kepentingan, seperti Dispora, KONI, FORMI, dan pihak lain di industri olahraga, sudah bertanggung jawab atas masalah yang dihadapi pemain dan pelatih.

Untuk memastikan bahwa para atlet siap untuk tampil maksimal, mereka dikirim ke tempat pemusatan latihan sebelum diterjunkan. Dana disediakan bagi atlet pelajar untuk mengikuti tempat pemusatan latihan selama beberapa hari. Tujuan dari pendanaan tersebut adalah untuk meningkatkan motivasi atlet dalam berkompetisi. Sebanyak 20 cabang olahraga lainnya akan berlaga dalam kompetisi ini. Dana tersebut digunakan untuk pembinaan atlet, honorarium, dan hadiah yang diberikan selama perlombaan. Terakhir, dana tersebut digunakan untuk memberi penghargaan kepada atlet berprestasi berupa bonus dan piala. Harus ada fasilitas tempat instruktur dan pemain berlatih agar pelatihan dapat berjalan efektif.

Ketika atlet berlaga dalam kejuaraan, baik di tingkat nasional maupun dunia, keberhasilan mereka akan terlihat. Kebijakan olahraga juga harus dibuat untuk mendukung pencapaian tersebut. Untuk mengarahkan dan mengendalikan pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi, maka disusunlah kebijakan olahraga.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Ulfah, 2021) sebelumnya, tanggung jawab Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam membantu pencapaian prestasi atlet adalah sebagai berikut:

Ketika semua pihak yang terlibat kolaborasi secara selaras demi visi yang sama, hasilnya adalah upaya terkoordinasi yang menyalurkan jumlah yang tepat pada saat yang tepat serta memandu pelaksanaan guna memastikan konsistensi. Organisasi yang terkoordinasi dengan baik, seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan lebih efisien. KONI merupakan pemain kunci dalam industri olahraga Indonesia dan kekuatan utama dalam pembangunan negara secara keseluruhan. Pertumbuhan dan pelatihan atlet sangat dipengaruhi oleh keberadaan organisasi, yang berupaya untuk meraih kesuksesan nasional dan individu. Pembinaan merupakan metode untuk membantu orang meningkatkan karakter dan perilaku mereka guna mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Hasil yang sesuai dengan harapan dapat dicapai melalui pembinaan yang terstruktur dengan baik dan kompeten. Di antara sekian banyak organisasi yang dipercaya untuk membina kemajuan di negara kita tercinta, Indonesia, adalah KONI. Mengembangkan kinerja atlet memerlukan pendekatan yang metodis dan mantap; pelatihan untuk mencapai kinerja puncak memerlukan serangkaian peningkatan bertahap yang mantap. Atlet mencapai kinerja puncak mereka dengan cara ini karena pelatihan mereka.

Meningkatkan Efisiensi

Kemajuan yang dicapai atlet dalam menyelesaikan pertandingan menuju tujuan tertentu merupakan ukuran peningkatan kinerja mereka. Keterlibatan atlet dalam olahraga telah meningkat, tetapi yang benar-benar membuat mereka bersemangat adalah kombinasi dari elemen intrinsik seperti motivasi intrinsik dan elemen eksternal seperti insentif finansial. (Mansur, 2021) adalah karya

sebelumnya yang membahas subjek yang sebanding: implementasi kebijakan. KONSEP IMPLEMENTASI DI PUBLIK. Selain keterlibatan masyarakat dan tindakan entitas administratif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, pelaksanaan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial oleh berbagai kelompok merupakan aspek integral dari implementasi kebijakan. Hal ini, jika dipraktikkan dengan benar, dapat berhasil menyelesaikan masalah. Teori dan sumber daya yang menjelaskan kebenaran implementasi kebijakan sangat penting saat menghadapi tantangan dan studi kebijakan yang rumit. Jika Anda mencari referensi untuk menilai dan menganalisis pelaksanaan kebijakan publik, artikel ini akan membantu Anda dengan dasar-dasarnya. Sederhananya, implementasi kebijakan adalah proses menjalankan atau menerapkan kebijakan. Setiap rangkaian kegiatan, prosedur, atau pengukuran yang saling terkait yang membentuk suatu sistem secara kolektif dikenal sebagai implementasi kebijakan. Pelaksanaan suatu kebijakan merupakan suatu proses yang disengaja dan direncanakan terlebih dahulu, yang benar-benar didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Berdasarkan analisis olahraga rekreasi dalam kaitannya dengan kebugaran fisik, minat dan motivasi untuk berolahraga, dan fasilitas olahraga rekreasi dalam studi peningkatan olahraga, menurut publikasi (Gumantan et al., 2020) berjudul Olahraga Rekreasi dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga, terdapat berbagai aspek pengembangan olahraga rekreasi yang memengaruhi nilai gerakan manusia dan, pada gilirannya, kualitas prestasi olahraga di Indonesia. Survei ini memetakan evolusi olahraga secara keseluruhan, termasuk bentuk tradisional dan rekreasi, serta peran bisnis olahraga dalam membina olahraga kompetitif yang lebih baik. Hal penting yang bisa didapat dari penelitian ini ialah jika pemerintah dan masyarakat sama-sama berkewajiban untuk meningkatkan standar olahraga rekreasi di Indonesia sehingga negara ini dapat mencapai tujuan Program Emasnya pada tahun 2045.

Makalah berjudul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Prestasi Olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia di Kabupaten Ciamis" (Ina Lorian Lorenza & Aan Anwar Sihabudin, 2022) mengacu pada penelitian sebelumnya tentang subjek yang sebanding. Kita dapat belajar banyak tentang kemampuan para pembuat kebijakan dan sejauh mana kebijakan dipengaruhi

oleh lingkungannya dengan mengamati bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, yang dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks penerapannya. Komite Olahraga Nasional Indonesia di Kabupaten Ciamis masih belum optimal dalam melaksanakan strategi Pemerintah Daerah tentang Pengembangan Prestasi Olahraga. Beberapa hasil studi mengonfirmasi hal ini, termasuk fakta bahwa KONI Kabupaten Ciamis kekurangan dana dan sangat kekurangan staf yang berkualifikasi. Akibatnya, tidak semua cabang olahraga menerima instruksi khusus yang dibutuhkannya. Beberapa disiplin atletik mengalami kekurangan pelatihan yang terorganisir, termasuk pembinaan yang tidak memadai. Ketidakmampuan pelatih menghambat pengembangan kemampuan fisik dan mental pemain, serta kemampuan mereka untuk berlatih secara strategis demi meraih kesuksesan. Sayangnya, kerangka administrasi KONI yang tidak teratur telah mengakibatkan evaluasi yang kurang baik terhadap pelatihan yang telah dilakukan. Terdapat kekurangan informasi dan dokumentasi yang parah tentang pelatihan atlet. Catatan-catatan ini, bagaimanapun, sangat penting untuk menunjukkan seberapa jauh atlet telah berkembang dan seberapa buruk pengawasan terhadap instruksi olahraga, khususnya di semua disiplin ilmu. Akibatnya, mencapai tingkat provinsi merupakan prestasi yang hanya untuk beberapa divisi atletik.

Penelitian sebelumnya yang membahas subjek serupa, termasuk penelitian (Amali, 2022) yang berjudul "Kebijakan Olahraga Nasional Menuju Indonesia Emas 2045." Tujuan olahraga, menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Olahraga, adalah untuk "mendorong, memelihara, dan mengembangkan potensi fisik, mental, sosial, dan budaya" melalui keterlibatan yang komprehensif dan metodis dari ketiga bagian manusia. Pendidikan, kesenangan, dan kesuksesan adalah tiga pilar yang menopang olahraga nasional. Untuk meningkatkan martabat dan kehormatan negara, sangat tidak mungkin untuk memprioritaskan olahraga prestasi dengan mengorbankan olahraga pendidikan dan rekreasi karena ketiganya saling bergantung dan membentuk unit yang tidak terpisahkan. dari karya sarjana lain, yaitu (Nababan, 2022) yang berjudul "Pengembangan Olahraga Rekreasi di Sumatera Utara." Ia mengutip Haryono (1978) yang mengatakan bahwa olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan di waktu senggang sebagai respons terhadap keinginan atau kebutuhan yang muncul karena menyenangkan. Partisipasi dalam olahraga ini

didasarkan pada prinsip-prinsip kesenangan atau kepuasan, positivisme, kesehatan, kebebasan dari paksaan, dan kinerja dalam suasana waktu luang. Ketika kita berbicara tentang olahraga rekreasi, kita mengacu pada aktivitas fisik yang dilakukan orang di waktu luang mereka untuk tujuan yang jelas untuk bersenang-senang, meningkatkan tingkat kebugaran fisik mereka, dan menonjolkan nilai-nilai positif, kesehatan, kesenangan, dan partisipasi sukarela.

Menurut penelitian terdahulu tentang topik dampak pelatihan terhadap SDM dan pengembangan karier (Maulyan, 2019), pembahasan SDM harus mencakup tugas-tugas manajemen lainnya seperti perencanaan masa depan, pengembangan manajer, dan pembentukan organisasi. Akan menjadi kelalaian jika kita tidak membahas pertimbangan manajemen ini secara terpisah mengingat hubungan yang kuat di antara keduanya. Tujuan berinvestasi pada orang melalui pendidikan dan pelatihan adalah untuk membangun modal manusia. Pengetahuan dan keterampilan dapat ditingkatkan melalui pelatihan, yang pada gilirannya berdampak pada produktivitas di tempat kerja. Akibatnya, kualitas SDM menjadi salah satu faktor terpenting untuk dipertimbangkan saat membuat prediksi. Kapasitas pekerja perusahaan untuk bekerja atau menciptakan sesuatu secara langsung terkait dengan sumber daya manusia. Oleh karena itu, program pendidikan dan pelatihan tetap diperlukan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Kemampuan yang dibutuhkan oleh organisasi sekarang dan masa depan harus menginformasikan struktur program pelatihan dan pendidikan serta landasan metodologi ilmiah. Sumber daya manusia dapat tumbuh dan beradaptasi berkat pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan kompetensi, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja.

2.1 Kajian Teori:

1. Eksekusi Kebijakan

Empat faktor—komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi—mempengaruhi eksekusi kebijakan, menurut tesis George C. Edward III (Agustino, 2006:149) dalam jurnal (Saputra et al., 2023). Berbicara satu sama lain. George C. Edward III berpendapat bahwa komunikasi yang efektif adalah komponen utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Ia melanjutkan dengan mengatakan

bahwa implementasi yang baik terjadi ketika para pengambil keputusan sudah tahu apa yang mereka lakukan, dan bahwa komunikasi merupakan penentu lebih lanjut dari efektivitas pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik. Setiap pilihan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikirim ke departemen personalia yang relevan sehingga pengetahuan tentang tindakan mereka dapat dibagikan secara efektif. Kebijakan yang disampaikan juga harus konsisten, akurat, dan tepat. Konsistensi para pengambil keputusan dan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan masyarakat bergantung pada ketersediaan komunikasi (transfer informasi).

Untuk menentukan seberapa efektif komunikasi yang disebutkan di atas, tiga metrik dapat digunakan: Implementasi yang baik adalah produk sampingan dari transmisi yang efektif, atau penyampaian informasi yang jelas dan ringkas. Kesalahpahaman sering muncul selama transmisi komunikasi; ini sebagian karena fakta bahwa pesan sering mengalami distorsi yang diprediksi saat melewati beberapa lapisan birokrasi. Pesan yang didengar oleh pelaksana kebijakan (birokrat di lapangan) harus sangat jelas, bebas dari ambiguitas atau makna ganda. Ada derajat di mana pelaksana membutuhkan keleluasaan dalam menjalankan kebijakan, dan keleluasaan ini terlepas dari ambiguitas pesan kebijakan. Namun, ini akan benar-benar bertentangan dengan tujuan strategi saat ini pada tingkat yang lebih dalam. Perintah yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kebijakan harus konsisten dan mudah dipahami agar dapat dilaksanakan. Untuk alasan sederhana bahwa pelaksana lapangan mungkin menjadi bingung jika arahan yang diberikan sering dimodifikasi.

Sumber Daya, Ketersediaan dana merupakan komponen kedua yang menentukan seberapa baik suatu kebijakan dilaksanakan. Menurut George C. Edward III, sumber daya merupakan isu penting lainnya dalam implementasi kebijakan. Sumber daya meliputi: Dalam hal pelaksanaan kebijakan, sumber daya yang paling penting adalah personel. Ketika kebijakan tidak dilaksanakan dengan baik, sering kali hal ini disebabkan oleh kurangnya personel yang berkualifikasi untuk melaksanakan

pekerjaan tersebut. Memiliki lebih banyak orang dalam staf tidaklah cukup untuk melaksanakan kebijakan atau menyelesaikan tanggung jawab yang diuraikan di dalamnya; harus juga ada cukup banyak orang dalam staf yang memiliki keterampilan dan bakat yang sesuai. Dalam hal pelaksanaan kebijakan, ada dua jenis informasi: pertama, ada informasi tentang kebijakan itu sendiri. Ketika diberi instruksi, pelaksana harus siap untuk melaksanakannya.

Kedua, Informasi tentang statistik seberapa baik pelaksana telah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Siapa pun yang bekerja pada implementasi kebijakan harus menyadari apakah mereka mematuhi hukum atau tidak. Formalitas sangat penting untuk pelaksanaan kewenangan yang efektif. Yang memberi lampu hijau kepada mereka yang bertanggung jawab untuk menjalankan agenda politik yang telah ditentukan sebelumnya adalah kewenangan mereka. Ketika kewenangan tersebut tidak ada, publik tidak melihat para pelaksana sebagai pihak yang memiliki kewenangan yang sah, yang dapat menghambat proses implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan juga sangat bergantung pada sumber daya, yaitu fasilitas fisik. Memiliki orang yang tepat, mengetahui apa yang perlu mereka lakukan, dan kewenangan untuk melakukannya tidak akan cukup untuk berhasil menjalankan kebijakan jika tidak ada infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan.

Keputusan akhir. Jika Anda percaya pada George C. Edward III, disposisi adalah komponen ketiga yang menentukan seberapa sering kebijakan publik berhasil diimplementasikan. Komponen penting ketiga dari setiap strategi untuk menjalankan kebijakan publik adalah pola pikir atau pandangan dari mereka yang bertugas untuk melaksanakannya. Untuk memastikan tidak ada prasangka dalam praktik, para pelaksana kebijakan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan agar suatu kebijakan berhasil. Terkait variabel disposisi, penting untuk diperhatikan hal-hal berikut: Pelaksanaan kebijakan yang diusulkan oleh pejabat tinggi akan sangat terhambat oleh penunjukan birokrat dan sikap atau disposisi mereka.

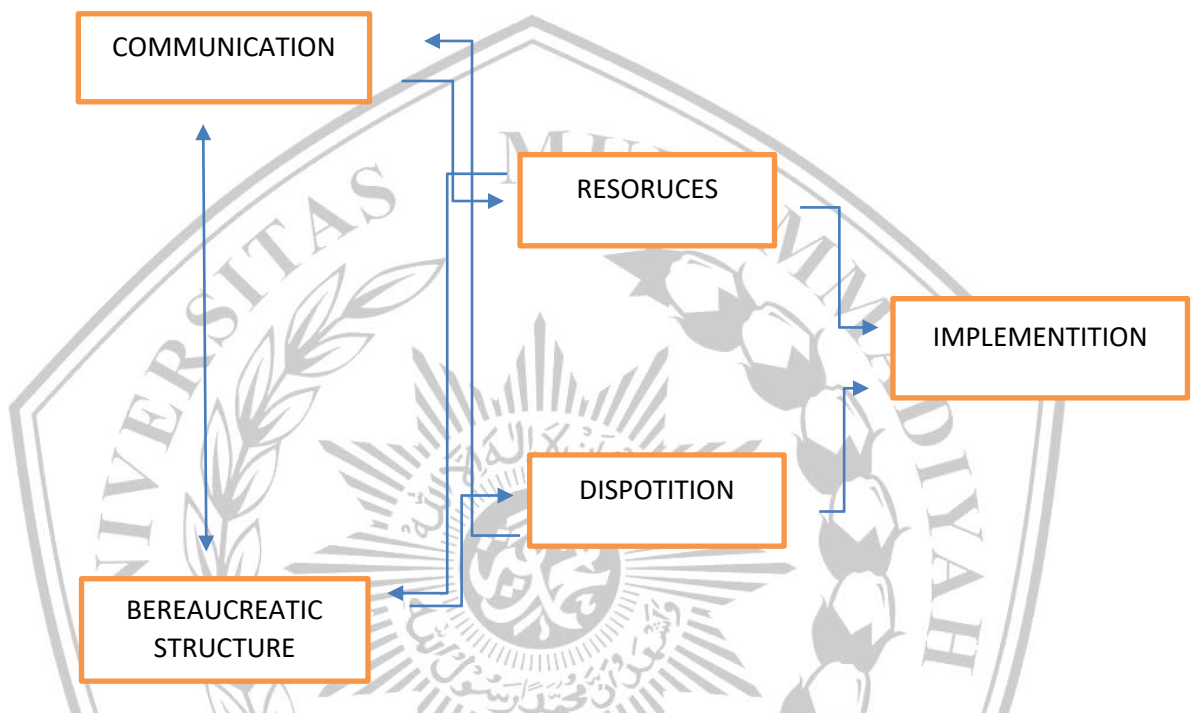
Dengan demikian, penting untuk memilih dan mempekerjakan pelaksana kebijakan yang berkomitmen terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, terutama untuk kepentingan rakyat. Sistem penghargaan, Menurut Edward III, salah satu solusi yang diusulkan untuk masalah kecenderungan pelaksana adalah mengubah insentif. Akibatnya, pembuat kebijakan dapat memengaruhi perilaku pelaksana kebijakan dengan menyesuaikan insentif, karena individu sering berperilaku sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Insentif bagi pelaksana kebijakan untuk melaksanakan arahan secara efisien mungkin berupa peningkatan biaya atau manfaat tertentu, atau pengeluaran tertentu. Motivasi untuk tindakan ini mungkin berakar pada kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi.

George C. Edward III berpendapat bahwa struktur birokrasi berperan dalam keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan publik. mungkin ada kesenjangan dalam sistem birokrasi yang mencegah kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif, bahkan ketika semua sumber daya yang diperlukan tersedia dan para pelaksana memiliki pengetahuan tentang tugas yang ada dan berdedikasi untuk menyelesaikannya. Sederhananya, cara birokrasi dijalankan dan diatur menentukan seberapa sukses kebijakan tersebut. Ini karena pembatasan struktural dapat menjadi hambatan terbesar untuk mengimplementasikan kebijakan sebagaimana dimaksud.

Banyak orang perlu dilibatkan agar kebijakan yang kompleks dapat dilaksanakan. Penggunaan sumber daya yang tersedia secara tidak efektif dapat menghambat implementasi kebijakan jika struktur birokrasi saat ini tidak mendukung kebijakan tersebut. Birokrasi, dalam kapasitasnya sebagai pelaksana kebijakan, sangat penting dalam memfasilitasi pelaksanaan kebijakan yang ditentukan secara demokratis secara efisien dan terkoordinasi dengan baik.

Prosedur Operasional Standar (SOP) dan fragmentasi tugas adalah dua fitur utama yang dapat meningkatkan efisiensi struktur birokrasi atau organisasi dalam melaksanakan kebijakan. Prosedur operasi standar (SOP)

menyediakan kerangka kerja untuk melakukan kegiatan rutin secara konsisten, yang membantu pekerja atau pelaksana kebijakan mematuhi standar yang ditetapkan. Di sisi lain, fragmentasi tugas adalah proses pembagian tugas di antara berbagai departemen untuk memastikan tugas administratif dan operasional dapat dilakukan dengan baik dan efektif. Kedua langkah ini akan membantu birokrasi melaksanakan tanggung jawab pembuatan kebijakannya dengan lebih efektif..



Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Edward III

Sumber: Penulis

2.2 Program Kejuaraan Tarkam

Kejuaraan Tarkam (Turnamen Antar Kampung), yang dicetuskan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), merupakan ajang olahraga yang bertujuan untuk meningkatkan semangat kompetisi di tingkat komunitas lokal. Program ini dirancang agar olahraga semakin dekat dengan masyarakat, sekaligus menjadi sarana untuk mengidentifikasi bakat atlet di berbagai wilayah serta memperkuat ikatan sosial antarwarga melalui kompetisi yang tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas.

Keunggulan utama dari Kejuaraan Tarkam terletak pada sifatnya yang berbasis komunitas, di mana pelaksanaannya berlangsung di tingkat desa atau kelurahan. Pendekatan ini memungkinkan turnamen menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk orang yang tidak mendapatkan peluang guna ikutserta pada kompetisi olahraga formal di tingkat yang lebih tinggi. Untuk mendukung kelancaran program, Kemenpora menyediakan fasilitas berupa sarana, prasarana, serta bimbingan teknis agar pelaksanaan kejuaraan berlangsung dengan baik dan profesional.

Selain mempromosikan budaya olahraga, Kejuaraan Tarkam juga membawa dampak positif dalam bidang ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi, kejuaraan ini menciptakan peluang bagi pelaku usaha kecil, seperti pedagang lokal, untuk meningkatkan pendapatan melalui event yang menarik banyak peserta dan penonton. Sementara itu, dari aspek sosial, turnamen ini berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan antarwarga, mengurangi potensi konflik, serta mendorong terciptanya lingkungan masyarakat yang lebih harmonis.

